

Judul : MKD segera panggil Azis
Tanggal : Rabu, 19 Mei 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

MKD Segera Panggil Azis

Tiga dari laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terkait dengan kasus korupsi dinilai memenuhi syarat.

SRI UTAMI

ami@mediaindonesia.com

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) telah menggelar rapat pleno yang membahas lima laporan terkait dengan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam pusaran kasus korupsi. Wakil Ketua MKD Trimedy Panjaitan mengatakan tidak semua laporan memenuhi syarat.

"Kami sudah membahasnya, sudah mempelajari juga lima laporan itu dan yang memenuhi syarat hanya tiga," ucapnya saat di-

hubungi, kemarin.

Dua laporan dinilai tidak memenuhi syarat karena organisasi dan status badan hukum pelapor diragukan. Kepastian status hukum serta organisasi yang jelas menjadi salah satu syarat penting dalam melakukan pelaporan ke MKD.

"Iya karena kami memeriksa semuanya termasuk organisasinya apa, bagaimana status hukumnya, dan lain-lain, ternyata ada yang diragukan atau tidak jelas," ungkap Trimedy.

Selanjutnya MKD menjadwalkan pemanggilan pihak pelapor dalam waktu dekat. Setelah pe-

lapor memenuhi panggilan, MKD akan menghadirkan pihak terlapor, yakni Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

"Kami akan mengundang dulu yang melaporkan dan kemudian baru Pak Azis yang akan kami undang. Kami targetkan bulan depan dari kedua pihak dapat hadir," papar Trimedy.

Nama Azis disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai orang yang mengenalkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahril dengan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju.

Dalam pertemuan tersebut, Syahril menyampaikan permasalahan terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK. Ia ingin agar kasus itu tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta bantuan Stepanus.

Stepanus bersama pengacara

Maskur Husain sepakat membuat komitmen dengan Syahril agar Syahril menyiapkan uang Rp1,5 miliar sebagai imbalan bantuan penghentian pengusutan kasus. KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka, sedangkan Azis masih berstatus sebagai saksi.

Terbuka

Dalam rapat pleno MKD, anggota MKD dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengusulkan agar pelaksanaan sidang etik Azis Syamsuddin dilakukan secara terbuka. Menurut Junimart, sidang MKD terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto dapat dijadikan patokan.

"Minta supaya sidang MKD terbuka supaya masyarakat tahu apa yang kita (MKD) lakukan," kata anggota MKD Junimart Girsang di kompleks parlemen, Senayan,

Jakarta, kemarin.

Menurut Junimart, pelaksanaan sidang yang terbuka dapat menjamin independensi MKD dalam memproses laporan dugaan pelanggaran etik Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

Selain DPR, KPK juga tengah menjalankan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Stepanus bukan hanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, melainkan juga diproses secara etik.

Dewan Pengawas KPK bahkan telah memeriksa Azis Syamsuddin, Senin (17/5). Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris membenarkan hal itu.

Meski begitu, ia mengaku tidak mengetahui detail hal-hal yang dialami Dewas pemeriksaan Azis. "Saya tidak tahu karena tidak ikut memeriksa," ucap Haris. (Uta/Ant/P-2)